

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara ini memiliki luas 3.173,304 KM. Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki jumlah penduduk mencapai 183,04 jiwa yang terdiri dari mayoritas agama Islam sebanyak 177.208 jiwa, agama Kristen 6.941 jiwa, agama Katolik 2.519 jiwa, agama Hindu 88 jiwa, agama Buddha 44 jiwa.³⁰

Kabupaten Penajam Paser Utara adalah kabupaten hasil dari pemekaran dari Kabupaten Pasir yang kini di sebut sebagai Paser pada tahun 2002. Sebagian dari daerah kabupaten ini yaitu kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang telah di tunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai lokasi Ibukota Negara (IKN) baru.

Balikpapan adalah sebuah kota Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur. Kota yang dijadikan sebagai pusat bisnis dan industry, kota ini memiliki perekonomian terbesar di seluruh Kalimantan yang memiliki luas sekitar 509,702 KM dan luas Pengelolaan laut mencapai 160.10 KM. Jumlah penduduk di kota ini sebanyak 703,61 jiwa dengan mayoritas agama Islam sebanyak 640.949 jiwa, agama Kristen 49.184 jiwa , agama

³⁰ Yusuf, Sanjaya Abdillah Karim “Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka (Penajam Paser Utara Regency In Figures)” BPS Penajam Paser Utara, 2022 hlm. 6-233

Katolik 12.785 jiwa, agama Buddha 5.964 jiwa , agama Hindu 1.370 jiwa, agama Konghucu 28 jiwa, aliran kepercayaan 13 jiwa. Kota yang langsung berdekatan dengan lokasi Ibukota Negara yang baru.

Kutai Kartanegara merupakan wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kabupaten tertua di Indonesia zaman Kerajaan Kutai sudah ada Kabupaten ini. Kabupaten yang memiliki luas 26.924,494 KM dan luas perairan sekitan 4.097 KM dengan jumlah penduduk 738,19 jiwa dengan mayoritas agama Islam 222.648 jiwa, agama Kristen 24.071 jiwa, agama Katolik 15.523 jiwa, agama Hindu 223 jiwa, agama Buddha 656 jiwa, agama Konghucu 21 jiwa, aliran kepercayaan 8 jiwa. Sebagian wilayah Kabupaten ini ditambah sebagai wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara yang akan dijadikan lokasi Ibukota Negara baru di Indonesia, yakni kecamatan Samboja dan Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara.³¹

Ketiga wilayah ini merupakan wilayah yang dekat dengan ibukota negara yang baru dan 2 wilayah tersebut yang merupakan titik yang akan dibangun pusat pemerintah ibukota negara yang baru di Indonesia.³²

³¹ Edi Damansyah BPS “Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Karta Negara 2023

³² Prima Agatha Yuniore Tahapary, Muhammad Ricky Pranata “Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka Kalimantan Timur” Kalimantan Timur: VC. Suvi Sejahtera, 2023. Hal 9-257

B. Temuan dan Analisis

1. Temuan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada empat orang informan, maka diperoleh gambaran-gambaran mengenai hak partisipasi public terhadap penyusunan UU IKN No. 3 tahun 2022 tentang perpindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur.

1. Informan I

Nama : Achmad Fitriady. M., SH., MH

Pekerjaan : Lurah Petung (Kabupaten Penajam Paser Utara)

Alamat : Jl. Penajam Lawe-lawe, Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan I terkait persepsi beliau mengenai hak partisipasi public terhadap penyusunan uu ikn no. 3 tahun 2022 maka diperoleh data sebagai berikut:

“Terkait dengan undang-undang nomor 3 tahun 2020 ya tentang negara Nusantara partisipasi publik itu tidak benar-benar tidak di libatkan dalam pembentukan undang-undang kebanyakan karena pada saat itu eee masa pandemi ya akhirnya Semuanya serba cepat serba instan prosesnya cepat yang kemudian akhirnya undang-undang itu diterbitkan walaupun partisipasi publik hanya sebatas orang yang tak benar-benar mengikuti perkembangan seperti misalkan pada saat itu lebih ramai virtual atau zoom yang kemudian mengundang orang yang benar-benar pengen tahu tapi kalau misalkan yang benar-benar masyarakat secara lokal Secara kultur lokal lokal dalam artian bukan yang sudah walaupun sukunya di luar daripada suku pasir asli sudah dah kah ditanya secara langsung Apakah mereka mengerti soal ikn apakah mereka mengerti hak

Apa saja yang mereka dapatkan dan kemudian Bagaimana pertahanan mereka yang dalam hal ini yang melihat perubahan secara cepat terhadap ibukota negara Nusantara itu sendiri gitu itu kan tidak benar-benar bahkan juga uji-uji kelayakannya pun juga hanya bagian dari akademisi tidak secara gamblang atau secara umum undang-undang nomor 3 tahun 2020 tersebut bahkan hari ini kan juga dilakukan uji lagi berdasarkan ada penambahan atau akan ada menyesuaikan kondisi lokal.”

“Bicara soal undang-undang nomor 3 sesuaikan dengan harapan masyarakat nah kalau kita melihat dalam perumusan undang-undang kita paling rendah aja lah pergub atau Perda artinya dalam perumusan Perda atau pergub sendiri itu kan juga harus mempertimbangkan yang pertama akademisi terus ahli dari pada legislatif terus kemudian SKPD atau masyarakat SKPD pengampu dalam Perda atau pergub tersebut , terus kemudian dampak sosial dari peraturan daerah Tokoh masyarakat tokoh agama misalkan itu Nah itu unsur dalam pembentukan regulasi unsur yang yang harus dipenuhi dalam pada saat perumusan undang-undang tersebut Nah apakah hari ini negara itu benar-benar melibatkan masyarakat Kaltim masyarakat Kaltim itu artinya tidak melihat kaltimnya saja tapi juga Masyarakat yang sudah tumbuh besar di Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri tidak hanya teman Paser Dayak mungkin juga bugis harus terlibat yang karena sudah tumbuh dan besar terhadap Kabupaten Padang Pasir Utara teman-teman Jawa suku-suku lainnya yang sudah Bagaimana menikmati tumbuh besar di Kabupaten Penajam Paser Utara”.

“Kabupaten Penajam Paser Utara hari ini Tidak benar-benar dilibatkan dalam artian apa sih yang benar-benar diakomodir itu berapa jumlah misalkan luas wilayah yang benar-benar hutan yang benar-benar katanya mengedepankan forest mudah-

mudahan itu bukan hanya sebatas jargon Beberapa menara yang sudah dibangun hari ini di IKN juga membabat pohon-pohon yang ada ya harapannya akan tumbuh subur dan hijau kembali dengan yang ada di dalam aktivitas sudah sudah sudah berjalan dari 2000 semenjak diketuknya undang-undang IKN tersebut hari ini udah berprogres dan berproses dan kalau kita bicara soal wilayah wilayah sepatu sangat berdampaknya berdampak sekali berdampak secara ekonomi berdampak secara sosial berdampak secara budaya sosialnya akan berubah Bagaimana kondisi kehidupan sebelumnya dengan orang-orang yang datang sekian ribu tenaga kerja yang datang di IKN itu juga akan menggeser Bagaimana nilai-nilai sosial yang sebelumnya sudah terbangun akan dengan pengaruh-pengaruh luar terus budaya hari ini teman-teman masyarakat pasir juga yang hari ini apakah sudah benar-benar di akomodasi kepentingan Mereka bicara tentang hutan-hutan dengan teman-teman rasa sendiri adalah bicara antara manusia dengan Tuhannya bagaimana Secara ibadahnya mereka yang misalkan masih keyakinan atau kepercayaan ibadah mereka dengan memberikan sesajen dan sebagainya Itu kan masih ada bicara tentang manusia dengan Tuhannya secara ibadahnya beda dengan kita yang muslim beribadah jelas dengan cara kita sendiri gitu yang teman-teman aswaroh atau Nasrani jelas ibadahnya ada di gereja kita di masjid gitu tapi kalau teman-teman yang masih animisme keyakinan kepercayaan dan masih bicara tentang hutan adalah tempat mereka ibadah belum lagi secara ekonomi kondisinya hari ini secara ekonomi bahkan sewa rumah itu sudah mencapai 4 juta perbulan di tempat itu Udah kota besar banget bahkan mungkin kalau di kelas-kelas Jakarta perbulan itu seperti sudah di Pantai Indah Kapuk kelas-kelas atas nah itu juga sudah terjadi di Sepaku sana.

“Sementara wilayah penajam sendiri tidak mendapatkan IKN itu apa sih yang didapatkan euforia apa sih terhadap IKN itu tidak benar-benar berasa dan berdampak yang merasa itu sudah hari ini yaitu tadi dari ekonomi sosial yang dekat dengan titik dari IKN sendiri terus kemudian jalan dari Simpang filter sampai ke sepaku udah baik nah itu yang yang dirasakan berubah yang signifikan dalam waktu cepat dari jalan yang rusak dari Simpang silkar menuju ke sepatu itu makan waktu sudah dulu waktu masih jalan rusak 2 jam setengah sekarang bisa ditempuh dengan 1 jam setengah itu lebih cepat bahkan hari ini juga bicara tentang harga nilai ganti rugi yang yang katanya tidak tidak wajar tapi boleh nanti survei ke daerah pemaduan Ketuk untuk untuk menanyakan Langsung di dekat pusat pembangunan IKN sendiri terus kemudian dengan upah buruh hari ini untuk wilayah Kalimantan Timur sendiri tukang itu aja udah 150 per hari pembantu tugas itu sudah 100 tapi kalau dibayar di bawah itu kan nggak akan ada yang mau kerja walaupun merekrut SDM lokal sekalipun dengan lisensipun ini kan udah nggak sesuai dengan kondisi daerah itu Terus yang kedua juga informasi terakhir beberapa hari yang lalu saya masuk ke sana banyak orang-orang yang sudah sudah kembali dan gajinya tidak tidak dibayar kena pengawasan terhadap distributor terhadap tenaga kerja juga harus jangan sampai melahirkan dengan penajam Pasir Utara sendiri melahirkan pengangguran-pengangguran yang tidak bisa balik lagi ke daerah asalnya itu dan memfilter jasa rekrutmen tenaga kerja yang ada di iKM itu jangan sampai berdampak kepada ketika Pembangunan ikan sudah selesai akan banyak pengangguran yang tinggal di Penajam Pasir Utara.”

“Bukan kapasitas saya untuk menyampaikan itu dengan berlandaskan penjelasan secara nilai-nilai akademis dari

pergeseran budaya dan itu harus ada ahlinya bicara soal budaya seperti budaya lokal teman-teman pasir sendiri teman-teman pasir sendiri mampu tidak mempertahankan nah identitas mereka dengan laju arus Orang yang pindah datang ke Kalimantan di Penajam Paser Utara sendiri terus kemudian Adakah jaminan terhadap teman-teman lokal tidak terjadi konflik of Interest terhadap suku-suku yang sudah datang Saya rasa juga mungkin juga akan potensinya kecil sekali untuk konflik seperti itu karena yang sebelumnya juga penajam Paser Utara lebih heterogen Yang udah berbagai macam suku, agama, ras dan golongan udah udah menyatu di Penajam khususnya di daerah kawasan ikn sendiri dan berbagai macam suku udah hadir di sana termasuk dominan karena memang suka aku adalah daerah transmigrasi yang notabenenya juga adalah teman-teman dari tanah Jawi gitu terus kemudian Adakah jaminan terhadap kerusakan lingkungan yang dilakukan terhadap pembangunan IKN hari ini akan bisa kembali dipulihkan itu juga adalah Ah penjelasan yang bisa menjelaskan adalah ahli dari pada orang-orang lingkungan sendiri terus kemudian orang-orang yang ada di sana ya misalkan Sisi Laut Sisi sungai itu yang kemudian mendistribusikan Bata ringan distributif dan batu gunung untuk pembangunan Nah itu orang-orang sana yang pasti paham.”

“Kalau itu lebih ke kondisi sosial ekonomi sosial tersebut itu adalah bagaimana merubah mindset yaitu peran pemerintah daerah sendiri peran pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Penajam Paser Utara memoles mindset dari masyarakat lokal tersebut bahwa bagaimana ikn ini adalah Berikan apa ya peradaban baru peradaban Baru terhadap Kalimantan Timur khususnya penajam Paser Utara peradaban baru tersebut Dengan ya peluang-peluang Kerja yang walaupun terbilang

tidak sesuai dengan biayanya setidaknya merubah mindset atau pola pikirnya untuk tidak berpangku tangan juga untuk harus tetap survive yang ekonomi menengah ke bawah tidak menjadi orang yang meminta-minta atau menadahkan tangan ke atas tapi menjadi pelaku terhadap eee peluang-peluang kerja yang ada di sekitar tersebut peran pemerintah daerah merubah pola pikir tersebut bahwa kita akan semakin termarginalkan tersingkirkan itu itu sudah harus di disingkirkan ya kalau saya pikir seperti itu tapi kalau masyarakatnya tidak mau merubah secara personal merubah pola pikirnya dia akan terus oleh keadaan dan dia akan terasingkan oleh keadaan sendiri dan tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut Nah itu kembali dari personalnya terus kemudian juga kembali kepada pemerintah daerah yang memiliki peran termasuk memberikan pelatihan sertifikasi dan hal-hal itu sudah dilakukan oleh pemerintah lain kalau halnya misalkan ya beberapa tahun yang lalu kita harus menekan pemerintah untuk melakukan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan untuk SDM lokal itu yang eee ketika dia mendapatkan eee mendapatkan sertifikasi tapi sudah bisa langsung aplikasi contoh misal kalau Barbershop itu adalah chapter ya dia bisa buka di pinggir jalan tanpa harus ada tempat itu dan menjadi seorang cepster baru terus berista dengan Modalkan sendiri juga bisa untuk menjadi barista buka kedai dengan kopi sendiri terus kemudian bekerja dengan orang lain Nah itu Sertifikasi-sertifikasi secara lisensi yang hari ini yang bisa bisa langsung dibutuhkan karena contoh aja Pekerja yang bakal masuk lagi kesepian 16.000 ribu informasi yang saya dapat Yang bakal masuk setelah lebaran yang notabennya digunakan sebanyak 35.000 ribu tenaga kerja untuk membangun Beberapa Tower Hunian untuk pegawai yang ada di IKN nanti.

“Saya rasa agak sulit itu ya karena kalau bicara bencana seperti tanah longsor banjir itu udah kodrat yang maha kuasa Kalau dibilang potensi banjir daerah sepaku itu memiliki potensi banjir yang besar gitu karena beberapa bulan yang lalu dengan durasi hujan yang begitu lama dengan tempo yang begitu lama akhirnya saya salah satu desa itu mengalami kebanjiran terus kemudian terkait dengan Kepadatan penduduk itu juga tidak ada jaminan buat kita karena dalam hal ini KTP seluruh Indonesia ya walaupun dia Misalkan Riau Jawa dan sebagainya dia juga punya hak untuk bisa bekerja Papua sekalipun untuk mencari peruntungan pekerjaan di sepaku sendiri dan itu juga sulit terkontrol untuk kita menekan orang supaya tidak bisa Ke sepaku sendiri dan Populasi itu juga pasti bertambah Agak sulit gitu Juga bicara soal tadi selain bencana. alam bencana alamnya juga agak sulit karena itu kan kodrat kodrat yang dari yang maha kuasa yang bencana alam longsor resiko dan sebuah pembangunan juga adanya resiko bencana alam itu karena bicaralingkungan juga Membangun suatu daerah juga harus mengorbankan lingkungan gitu nggak nggak bisa bertahan cuman kita bicara tentang regulasi atau advan terhadap pembangunan yang Forest city itu yang berwawasan lingkungan harus kita sama-sama pegang Teguh pegang Teguh itu dalam artian menyesuaikan hal-hal yang menjadi tahapan-tahapan tersebut dan menjadi kontrol untuk misalkan menanam pohon ketika kita menebang satu pohon harus ada kelipatan 2 terhadap pohon tersebut nanti juga harus kita tetap Monitor demi kepentingan IKN”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan menurut informan bahwa hak masyarakat kalimantan timur terhadap landasan UU IKN No.3 tahun 2022 tidak terdapat hak partisipasi dalam penyusunan UU IKN No.3 tahun 2022 tentang

perpindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Karena realita yang ada masyarakat tidak berperan penting dalam penyusunan UU IKN tersebut.

Kemudian mengenai pengaruh dari hak partisipasi publik bahwasanya dapat dikatakan tidak ada pengaruh dari adanya dalam pembuatan UU IKN no 3 tahun 2022 tersebut. ³³

2. Informan II

Nama : Ari Trisna

Pekerjaan : Pegawai Bank BNI, konten creator.

Alamat : Balikpapan Damai Kota Balikpapan Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan II terkait persepsi beliau mengenai hak partisipasi public terhadap penyusunan uu ikn no. 3 tahun 2022 maka diperoleh data sebagai berikut:

“Mengenai partisipasi dan dampak dari IKN ini sebelum melangkah kesana saya ingin berpendapat bahwa Kalau masalah masyarakat saya antusias yang pasti mendukung Karena meningkatkan pendapatan daerah bagi mereka sendiri, karena latar belakang sudah jelas seperti yang disampaikan sama yang di Sampaikan untuk pemerataan bukan Jawa saja kan itu pastinya kalau kamu ambil bahan tentang IKN dia pasti Sangat bermanfaat dan berdampak pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.

³³ Achmad Fitriady, Lurah Petung, wawancara, Petung, 15 April 2023.

apalagi Balikpapan dan penajam pasir utara kan itu sangat berdampak sekali dengan penambahan penduduk. Kalau semakin lama semakin macet di Balikpapan iya itu karena efeknya itu positif dan negative, negative nya penambahan penduduk dan positif nya kenaikan ekonomi negatifnya lagi harga semakin mahal tapi walaupun mahal orang tetap beli karena itu memang kebutuhan. Kemudian mengenai Perlu kah hak masyarakat ikut serta dalam penyusunan UU IKN NO 3 TAHUN 2020 jadi hak partisipasi publik tersebut tidak perlu karena tidak ada hubungannya sama masyarakat karena sudah ada yang mewakili. hanya pihak pihak tertentu atau oknum-oknum yang mungkin tidak setuju dengan penyusunan UU IKN tersebut.”

“Bahkan nanti di IKN ada yang namanya IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) dia sudah bekerja sama dengan PUPRT jadi di sana pekerjaannya itu di sediakan kantin dia gak boleh keluar IWAPI yang mengurusin jadi didalam sana itu ada kantin, ada makanan dan minuman semua di sana di fasilitasi sangat koplit jadi pekerja di sana gak keluar ada mess nya HPK (Hunian Pekerja Kontruksi) ada 24 tower (tower dalam artian tempat hunian pekerja kontruksi itu) HPK tower ini nanti di bangun istana ke presidenan, bangunan segala macam dan nanti ada bank Indonesia”.

“Kalau ibu kota negara gak di pindah gak banyak masyarakat yang berbondong-bondong selalu yang tujuan pasti Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Jakarta apa apa kesana terus hasil pendapatan daerah yang nikmat pasti pusat makanya dengan adanya perpindahan ibukota negara jadi pemerataan di segala bidang, undang-undang udah bagus dan sistem udah bagus tapi kalo masyarakatnya bobrok menjalankan maka akan tetap bobrok dengan adanya perubahan itu ya biar untuk merubah kultur yang dulunya ke Jawa setris harus bisa merata karena biar jadi efektif untuk kesemuanya, otomatis yang di Pulau Kalimantan di pulau-pulau lain di ujung-ujung khususnya wilayah timur ikut kena imbasnya juga jadi gak perlu sistem yang terlalu banyak. Dengan pindahnya ibu kota negara ini juga ada kemajuan dalam pembangunan di Kalimantan Timur yaitu salah satunya yang sudah jadi Jalan Tol, yang mana jalan tol ini menghubungkan IKN dengan 2 kota sekaligus yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan menurut informan bahwa hak masyarakat Kalimantan Timur terhadap UU IKN No.3 tahun 2022 tidak diperlukan adanya hak partisipasi masyarakat dalam penyusunan UU IKN tersebut dikarenakan pada dasarnya suara masyarakat sudah diwakilkan oleh DPRD Kalimantan Timur.

Kemudian mengenai pengaruh dari hak partisipasi publik ialah tidak begitu berpengaruh terhadap pembuatan UU IKN no 3 tahun 2022.³⁴

3. Informan III

Nama : Khalik

Pekerjaan : Pekerja pengangkut minyak dan logistik di penajam
paser utara

Alamat : Balikpapan Damai Kota Balikpapan Kalimantan
Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan III terkait persepsi beliau mengenai hak partisipasi public terhadap penyusunan uu ikn no. 3 tahun 2022 maka diperoleh data sebagai berikut:

“Dampak dalam perpindahan ibukota negara ini menurut saya ada positif dan negatifnya juga, positifnya ekonomi di Kalimantan Timur tergolong lebih tinggi di banding tahun-tahun sebelum nya ini berarti ekonomi di Kalimantan timur naik lebih tinggi dengan adanya pembangunan ibu kota ini. Untuk kerusakan lingkungan menurut saya itu kita bisa liat dari kelakuan masyarakatnya sendiri yang berada di lingkungan itu atau masyarakat itu apakah bisa menjaga lingkungan itu sebab kita

³⁴ Ari Trisna, Pegawai Bank BNI konten creator, *wawancara*, penajam paser utara, 24 april 2023.

tidak bisa menyalahkan atau menerka dengan di bangunnya IKN ini nanti lingkungan akan bisa rusak, itu semua kita balikkan lagi kepada masyarakatnya bagaimana mereka bisa menjaga lingkungan itu atau tidak. Pada dasarnya memang mungkin nanti dampak negatif nya dengan perpindahan ibukota negara ini akan menyebabkan nya kepadatan penduduk hal itu kemungkinan juga akan menaik nya jumlah sampah jika masyarakat itu tidak bisa menjaga atau mereka membuang sampah di alam itu kemungkinan dampak negatif yang akan terjadi. Untuk kepadatan penduduk itu sendiri memang akan menyebabkan kepadatan lalu lintas di daerah sekita IKN tersebut hal itu juga sebenarnya harus di perhatikan pemerintah dan pemerintah juga harus mencari solusi bagaimana supaya lalulintas ini nantinya tidak terlalu padat.”

“Apasih maksud dan tujuan orang orang itu beda kita harus tau karena tadi katanya apakah perlu hak partisipasi masyarakat itu. Hal yang mengatakan atau mempermasalah kan hak masyarakat dalam penyusunan uu ikn no 3 tahun 2022 ini merupakan oknum saja yang membawa masyarakat ke dalamnya. Buktinya saja fine aja di sana tidak ada malah dan gejolak disana, dalam hal yang protes mengapa hal partisipasi masyarakat ini tidak di ikutsertakan dalam penyusunan itu merupakan hal yang wajar dimana mana pasti timbul aja seperti itu gejolaknya akan

tetapi gejala tersebut di secara menyeluruh cuman sebagian aja. tidak ada semua kebijakan diterima oleh masyarakat akan tetapi itu tidak masalah. Untuk hal itu kita harus tau masyarakat yang mana mengatakan hal tersebut bahwasannya hak partisipasi masyarakat ini harus di ikut sertakan dalam penyusunan UU IKN tersebut. Terkadang anak-anak muda ini gampang terpacu dan mengikuti dengan berita yang ada dengan berita yang mungkin memprovokasi dalam penyusunan UU IKN tersebut mungkin itu hanya oknum yang menolak adanya perpindahan ibu kota negara tersebut. bahkan untuk kita harus memilah kata kata yang ada di berita sosmed atau berita yang kita dengar dari pembicaraan agar tidak terjadi kesalah pahaman dan juga kita harus lebih teliti untuk mencari sumber yang akurat betul apa gaknya berita tersebut.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan menurut informan bahwa hak masyarakat kalimantan timur terhadap landasan UU IKN No.3 tahun 2022 tidak terlalu penting karena masyarakat tidak harus ada dalam penyusunan UU IKN tersebut hanya saja oknum oknum yang mempermasalahkan hal hal yang demikian rupa.

Kemudian mengenai pengaruh hak partisipasi publik tersebut ada atau tidak partisipasi publik tersebut pasti tetap akan ada yang namanya UU IKN tersebut.³⁵

³⁵ Khalik,pekerja di penajam paser utara,wawancara,, penajam paser utara ,28 april 2023

4. Informan IV

Nama : Upik

Pekerjaan : Tokoh Pemuda Semboja

Alamat : Jl Balikpapan-semboja, Margomulyo, kec. Samboja,
Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan IV terkait persepsi beliau mengenai hak partisipasi public terhadap penyusunan uu ikn no. 3 tahun 2022 maka diperoleh data sebagai berikut:

“Dampak yang aku rasakan di daerah semboja ini ya jalan dari Balikpapan menuju semboja ini terbilang lebih baik dari sebelumnya dan lebih lebar lagi dari sebelumnya juga. Mulai banyak jalan dari Balikpapan menuju Semboja ini yang diperbaiki oleh pemerintah alhamdulillah aspal nya terbilang cukup mulus walaupun hanya sebagian jalan. Akan tetapi ya ada juga masih jalan yang masih rusak di daerah sini aku berharap sekali pemerintah lebih memperhatikan lagi daerah daerah yang mungkin belum terjamak atau daerah yang mungkin belum terlihat agak daerah tersebut di perbaiki juga ya agar aktifitas masyarakat yang ada di sana berjalan lancar juga si dengan harapan aku ini. Salah satu dampak nya juga dari adanya ibukota negara ini yang di sahkan di Kalimantan Timur ya jalan Tol itu sekarang tidak banyak lagi mobil besar melewati jalan sini

walau gak semuanya ya tetapi bisalah mengurangin adanya kerusakan jalan yang terjadi nantinya di daerah sini. Aku juga berharap si sisa sisa batubara ini bisa diperbaikiin agak tidak terjadi banjir atau meantisipasi banjir soalnya tidak adanya penyerap air yang diakibatkan botak nya hutan yang ada di sekitar sini mudahan dengan dipindahkan ibukota negara di Kalimantan Timur ini semua kerusakan yang ada di daerah semboja ini ya tidak hanya di semboja ini akan tetapi daerah yang ada di sekita seperti Balikpapan, Samarinda, ya daerah yang ada di sekita ikn lah pokok nya aku harapkan kepada pemerintah harus lebih diperhatikan supaya daerah-daerah yang ada di Kalimantan Timur ini lebih maju lagi.”

“Untuk hak partisipasi masyarakat menurut saya penting yak arena di dalam suara masyarakat itu ada suatu hal yang mungkin bisa mengenai kepentingan di daerah tersebut apalagi ya yang harus di ikut sertakan orang sekitaran IKN itu. Mereka lebih tau kondisi seperti apa di IKN itu dan juga suara dari hak partisipasi masyarakat ini menurut saya ya agar lebih memudahkan pemerintah dalam penyusunannya dan juga agar masyarakat tau ni bahwasannya UU IKN akan di sahkan.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan menurut informan bahwa hak masyarakat kalimantan timur terhadap landasan UU IKN No.3 tahun 2022 bahwasanya hak masyarakat

ialah penting karena untuk kepentingan daerah itu sendiri sehingga masyarakatlah yang seharusnya ikut andil didalamnya.

Kemudian mengenai pengaruh hak partisipasi publik dalam UU IKN no 3 tahun 2022 ialah pasti sangat berpengaruh karena karena da hak partisipasi masyarakat didalamnya.³⁶

³⁶ Upik, Tokoh Pemuda Semboja, *Wawancara*, Semboja, 3 mei 2023.

2. Matriks

Hak Partisipasi Publik Terhadap Penyusunan Uu Ikn No. 3 Tahun 2022 Tentang Perpindahan Ibu Kota Negara Di Kalimantan Timur.

No	Informan	Hak masyarakat Kalimantan Timur	Pengaruh hak partisipasi publik
1.	Achmad Fitriady. M., SH., MH	hak masyarakat kalimantan timur terhadap landasan UU IKN No.3 tahun 2022 tidak terdapat hak partisipasi dalam penyusunan UU IKN No.3 tahun 2022 tentang perpindahan ibu kota negara di kalimantan timur. Karena realita yang ada masyarakat tidak berperan penting dalam penyusunan UU IKN tersebut.	Sama sekali tidak ada pengaruhnya.

2.	Ari Trisna	hak masyarakat kalimantan timur terhadap UU IKN No.3 tahun 2022 tidak diperlukan adanya hak partisipasi masyarakat dalam penyusunan UU IKN tersebut di karenakan pada dasarnya suara masyarakat sudah diwakilkan oleh DPRD Kalimantan Timur.	pengaruh dari hak partisipasi publik ialah tidak begitu berpengaruh terhadap pembuatan UU IKN no 3 tahun 2022.
3.	Khalik	hak masyarakat kalimantan timur terhadap landasan UU IKN No.3 tahun 2022 tidak terlalu penting karena masyarakat tidak harus ada dalam penyusunan UU IKN	pengaruh hak partisipasi publik tersebut ada atau tidak partisipasi publik tersebut pasti tetap akan ada yang namanya UU IKN

		tersebut hanya saja oknum oknum yang mempermasalahkan hal hal yang demikian rupa.	tersebut
4.	Upik	hak masyarakat kalimantan timur terhadap landasan UU IKN No.3 tahun 2022 bahwasanya hak masyarakat ialah penting karena untuk kepentingan daerah itu sendiri sehingga masyarakatlah yang seharusnya ikut andil didalamnya.	pengaruh hak partisipasi publik dalam UU IKN no 3 tahun 2022 ialah pasti sangat berpengaruh karena kana da hak partisipasi masyarakat didalamnya

3. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan terkait hasil penelitian, maka peneliti melakukan analisis terhadap hasil penelitian kepada penelitian tersebut kepada dua pokok permasalahan.

1. Hak masyarakat kalimantan timur terhadap landasan UU IKN No.3 tahun 2022.

Dari hasil wawancara yang telah diuraikan dalam laporan hasil penelitian yang dilakukan dengan informan sebanyak 4 orang, dimana informan tersebut berpendapat bahwasanya mengenai hak masyarakat Kalimantan timur terhadap landasan UU IKN no.3 tahun 2022 tersebut tidak berperan penting atau tidak diperlukan adanya hak masyarakat dalam penyusunan UU IKN no.3 tahun 2022 tersebut.

2. Apa pengaruh hak partisipasi publik dalam pembentukan UU IKN no 3 tahun 2022.

Dari hasil wawancara yang telah diuraikan terdapat perbedaan pendapat antara informan I, II, III, berpendapat sama akan tetapi informan IV berpendapat berbeda dari informan I, II, III. Informan I, II, III menyatakan hak dan pengaruh partisipasi publik itu tidak penting atau tidak perlu akan tetapi informan IV berpendapat bahwasanya hak dan pengaruh partisipasi publik tersebut penting dalam adanya UU IKN no 3 tahun 2022 tersebut.